



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 03 Februari 2017

Halaman: 13

TPS untuk Difabel Rawan Akurasi Daftar Pemilih

YOGYA, TRIBUN - Keberadaan pemilih dari kalangan penyandang disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS) menjadi salah satu faktor kerawanan. Hal itulah yang membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta menambahkan adanya jumlah TPS rawan dalam hal akurasi daftar pemilih.

Komisiner Panwaslu Kota Yogyakarta, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Iwan Ferdian menjelaskan, Berdasarkan data daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Kota Yogyakarta 2017, tercatat sebanyak 837 pemilih dari penyandang disabilitas atau lebih banyak dibanding saat Pemilihan Presiden 2014 yaitu 267 pemilih.

"Hal inilah yang kami catat sebagai salah satu kerawanan akurasi daftar pemilih. Hal ini karena pemilih ini membutuhkan perhatian khusus," ujarnya usai bertemu dengan Komisi A DPRD setempat, Kamis (2/2).

Perlu diketahui Panwaslu setempat menyampaikan hasil pertemuan tahap pertama diketahu

hui, 54 TPS memiliki potensi kerawanan pada aspek akurasi data pemilih, 51 TPS rawan ketersediaan logistik, 66 TPS rawan politik uang, enam TPS rawan keterlibatan penyelenggaraan negara, 199 TPS rawan profesionalitas penyelenggara dan 81 TPS rawan konflik.

Iwan juga menyebut, adanya pemilih yang merupakan difabel ini menuntut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk dapat memberikan pelayanan kepada pemilih dari penyandang disabilitas. Dia juga meminta KPPS jangan saling lempar tanggung jawab, agar para penyandang disabilitas ini bisa menggunakan hak pilihnya sebagaimana mestinya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan pada proses pemilihan yang dilakukan oleh pemilih difabel. Hal ini karena sangat rawan terjadinya pengarahannya untuk mencoblos pasangan calon tertentu.

"Kami sudah tempatkan peng-

TPS untuk

• Sambungan Hal 13

awas kami. Kalau ada kejadian, mereka langsung siap merekam dan diupload langsung," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta pun diminta untuk melakukan bimbingan teknis kepada KPPS termasuk saat memberikan pelayanan kepada pemilih dari penyandang disabilitas. Sebelumnya, dia menyebut dari 460 TPS rawan, paling banyak me-

mang kerawanan di TPS terkait politik uang, konflik dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Dia menjelaskan, untuk aspek politik uang, lebih didasarkan pada sifat masyarakat dan pemilih yang pragmatis. Sehingga, dengan iming-iming uang, akan lebih mudah untuk membeli suaranya. Hal itulah yang menjadi alasan masyarakat mudah dibelikan suaranya karena sifat masyarakat yang permisif dengan adanya praktik tersebut.

Sebelumnya, Komisi Pe-

milihan Umum Kota Yogyakarta mencatat sebanyak 837 penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2017. Jumlah tersebut sudah meningkat dibanding jumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 792 orang.

Komisiner KPU Kota Yogyakarta Sri Surani di Yogyakarta menjelaskan, penyandang disabilitas yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Kota Yogyakarta 2017 terdiri dari

tuna netra sebanyak 135 pemilih, tuna daksa 244 pemilih, tuna runtu 220 orang, tuna grahita 163 pemilih dan disabilitas lainnya sebanyak 75 pemilih.

"Kami akan berupaya agar pemilih dari penyandang disabilitas tersebut mampu mengakses tempat pemungutan suara (TPS) dengan mudah termasuk akses saat memberikan suara mereka. Yang pasti, mereka bisa dengan mudah masuk TPS dan memberikan suara," ujar Sri. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005